



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUL BAHRI BORUT
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 90522

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah Seluas 929 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/360 m2 di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, CHEVROLET MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 286.038.612

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 4.332.538.612

III. HUTANG Rp. 26.529.790

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.306.008.822



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.